

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi ketertarikan penulis dalam mengambil pokok permasalahan mengenai topik, **“Kebijakan Fidel Ramos terhadap Moro National Liberation Front (MNLF) di bawah pimpinan Nur Misuari”**, sebagai judul dari skripsi ini.

Pertama, Penyusun merasa tertarik dengan gerakan MNLF atau Front Pembebasan Nasional Moro yang berangkat dengan dasar Islam walaupun pada perkembangannya mengalami pergeseran menjadi nasionalis yang berjuang membela Bangsamoro dalam menuntut hak mendirikan sebuah Negara otonomi penuh di wilayah Filipina.

Kedua, penulis ingin mengetahui sejauh mana kebijakan Fidel Ramos untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, sebagai upaya memajukan perekonomian masyarakat Filipina secara umum termasuk bangsa minoritas Moro.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain adalah untuk dapat memberikan eksplanasi mengenai sejauh mana kebijakan Fidel Ramos dalam menyikapi kemelut dengan MNLF sehingga terbentuklah suatu Perjanjian Damai tahun 1996. Selain itu, diharapkan dengan penelitian ini dapat

memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam disiplin pengetahuan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya yang berkenaan dengan Hubungan Internasional.

C. Latar Belakang Masalah

Sejarah konflik yang terjadi di Mindanao pada masa kolonialisme, lebih banyak dipicu akibat perbedaan identitas agama dan pola relasi yang sangat eksploitatif yang dilakukan oleh Spanyol di Filipina. Perlawanan yang sangat heroik muncul terhadap bangsa asing yang dianggap kafir, bahkan resistensi Bangsa Moro berlangsung hingga ratusan tahun.

Perlawanan terhadap imperialisme kolonial berlanjut setelah terbentuknya Negara-bangsa baru. Konflik ini berakar pada ketidakpuasan antara Moro terhadap Malacanang sebagai pemerintah pusat pasca kolonialisme, hal mana menguatkan identitas etnis. Bangsa Moro merupakan Kesultanan Islam yang merdeka dan tidak pernah berada dalam taklukan kolonialisme apalagi menjadi bagian dari sebuah Negara yang dibentuk oleh kolonialisme itu sendiri, yaitu Republik Filipina. Jikapun ada, penyatuan itu lebih bersifat solidaritas dalam menentang kolonialisme yang kemudian berkembang menjadi konsensus politik dengan harapan dan kepercayaan terhadap masa depan bersama yang lebih baik.

Kenyataan sosial-politik dan ekonomi yang ada dalam Negara-bangsa yang baru ini telah menguapkan harapan dan kepercayaan yang telah dipegang oleh bangsa Moro pada awal-awal kemerdekaan dan berlanjut

menjadi sebuah gerakan pemisahan diri yang semakin nyata dan terbuka. Gerakan yang muncul dan yang paling menonjol adalah Moro National Liberation Front (MNLF). Dalam perjuangannya untuk memperoleh otonomi regional dan pemisahan, MNLF melakukan berbagai usaha untuk menarik simpati, dukungan dan solidaritas dari kaum Muslim se-Dunia, sehingga dalam kurun waktu 1972-1974, gerakan MNLF bisa menyatukan simpati masyarakat Islam tidak hanya di Mindanao tetapi juga mengundang minat Negara-negara Islam untuk membantu secara politik dan finansial. MNLF mendirikan perwakilannya di banyak Negara Islam dan melalui organisasi propagandanya, selalu menunjukkan penindasan yang dialami umat Islam di Mindanao sebagai sebab utama keinginan mereka untuk melepaskan diri dari Negara Filipina.

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat kepada upaya pemisahan diri ini adalah dengan pemberian otonomi. Presiden Ferdinand Marcos atas desakan Organization of Islamic Conference (OIC) menawarkan gencatan senjata sekaligus konsep "Kawasan Otonomi Muslim" kepada Bangsa Moro melalui Perjanjian Tripoli 1976. Sejak itu, secara gradual terjadi perubahan bentuk perjuangan: dari gerakan militer menuju perjuangan politik dan diplomasi. Akan tetapi, kebijakan otonomi di Mindanao tidak pernah diwujudkan. Kekecewaan kemudian muncul kembali bahkan diiringi dengan upaya pemisahan diri yang lebih kuat dan massif. Perang kembali berkobar dengan korban terbanyak di pihak sipil, bahkan

kemudian pemerintah mengumumkan Mindanao berada di bawah Martial Law.

Runtuhnya rezim Ferdinand Marcos membawa perubahan baru. Presiden terpilih Corazon Aquino kembali membuka dialog dengan muslim Moro. Dengan fasilitasi OIC, pembicaraan intensif mulai dilakukan pada tahun 1986 dengan faksi perjuangan yang terbesar, yaitu, MNLF, guna mencari solusi atas konflik yang telah menahun tersebut. Namun, dialog baru menunjukkan hasilnya ketika Filipina berada di bawah kepemimpinan Fidel V. Ramos dimana pada tanggal 2 September 1996 pemerintahan otonomi Mindanao yang pada prinsipnya adalah pemberian kekuasaan sebagian kepada wilayah tertentu dengan aparat terpilih, terbentuk. Ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana termaktub dalam 1996 Peace Agreement.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Kebijakan Apakah yang diterapkan Fidel Ramos terhadap Moro National Liberation Front di bawah pimpinan Nur Misuari?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Konflik adalah suatu kondisi sosial yang timbul pada satu atau lebih aktor untuk mengejar kepentingan tertentu pada saat bersamaan. Dalam

hubungan internasional, perilaku konflik dapat diamati sebagai apa yang disebut perang, baik sebagai suatu hasil yang mengancam ataupun sebagai suatu kenyataan yang terjadi. Sedangkan sasaran konflik dapat dibagi menjadi dua, yaitu konflik dengan sasaran keseimbangan dan konflik dengan sasaran hegemoni. Konflik dapat memiliki muatan positif, bisa juga negatif. Ekspresi kekerasan dari sebuah konflik adalah sisi destruktifnya. Konflik terjadi karena pihak-pihak yang bertikai berusaha mencapai tujuan mereka dengan cara memuaskan kebutuhan, mempertahankan nilai-nilai dan memaksakan kepentingan. Selain itu juga konflik disebabkan oleh:

1. sumber daya manusia yang tidak mencukupi
2. kurang atau tidak adanya komunikasi antara pihak-pihak tersebut
3. masing-masing pihak yang bertikai tidak memiliki pandangan yang sama
4. kurangnya rasa percaya diri satu sama lain
5. masing-masing pihak tidak menghargai hubungan antar mereka
6. kekuasaan terpusat (tidak dibagi secara merata)¹

Selain itu, konflik juga muncul sebagai akibat dari adanya sumber yang terbatas namun dihadapkan pada kepentingan yang tidak terbatas; adanya alokasi sumber yang timpang; adanya benturan kepentingan; tidak

¹ Peter Harris dan Ben Raily, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar Sejumlah Pilihan untuk Negosiator* International IDEA, Jakarta, 2000, hal. 12.

adanya saling ketergantungan; tidak adanya mekanisme otoritas yang menguasai dan hasil lebih dikedepankan daripada proses.

Menurut John Burton, konflik adalah sesuatu yang intrinsik dalam hubungan manusia, sehingga yang harus dilakukan para analis resolusi konflik adalah menangani hubungan antarmanusia dengan lebih baik.² Bagi Burton, yang memungkinkan penyelesaian konflik dengan kekerasan adalah aplikasi teori kebutuhan melalui sebuah komunikasi yang dikendalikan atau pendekatan pemecahan masalah. Jika konflik dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kebutuhan dasar tersembunyi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.³

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilaku konflik tidak lagi penuh kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, dan strukturnya telah diubah. Adapun faktor-faktor utama yang menimbulkan konflik di Mindanao di bidang politik berupa kebijakan yang tidak mengakomodasi nilai dan pandangan Bangsa Moro. Dan di bidang ekonomi berkaitan dengan ketimpangan pembangunan dan infrastruktur, meskipun Mindanao merupakan penyumbang devisa terbesar sektor pertanian.

Situasi yang terjadi di Mindanao relevan dengan tesis yang dibangun oleh Ted Robert Gurr dalam bukunya *Why Men Rebel* yang menjelaskan

² Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Menengah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal. 69.

³ *Ibid*, hal. 72-73.

tentang mengapa orang memberontak. Gurr juga menganalisa mengenai faktor apa yang menyebabkan suatu pemberontakan ditujukan pada sistem politik, keadaan sosial seperti apa yang mematangkan situasi untuk pemberontakan serta akibat dari pemberontakan tersebut. Konsep dasar yang digunakan Gurr atas serangkaian pertanyaan tersebut adalah “perampasan” (*deprivation*). Perampasan merupakan pemicu utama yang menyebabkan orang memberontak, jika ia merasa sesuatu yang dihargainya dirampas. Perasaan ini muncul akibat tidak sesuainya keinginan dengan kemampuan untuk mencapainya. Kemampuan untuk mencapai keinginan dirasakan ada, tapi, upaya mencapainya dihambat atau digagalkan. Kondisi inilah yang menimbulkan rasa dirampas, yang kemudian memunculkan agresivitas atau penggunaan kekerasan. Agresi yang bertujuan melukai pihak sasaran baik secara fisik ataupun non-fisik. Penghambatan tidak selalu mengakibatkan kekerasan. Jika penghambatan tidak menimbulkan kemarahan, maka pihak yang “frustasi” tidak akan agresif. Kemarahan akibat penghambatan inilah yang mendorong orang untuk agresif. Makin besar hambatannya, makin besar kemungkinan timbul kemarahan, kian besar pula dorongan untuk melakukan kekerasan.

Pemberontakan pada umumnya berupa serangan terhadap pihak yang menjalankan kekuasaan, golongan pesaing politik dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Merekalah yang dianggap sebagai perampas. Gurr membedakan tiga bentuk kekerasan dalam pemberontakan: kekacauan, konspirasi, dan perang dalam negeri. Kekacauan terjadi secara spontan dan

tidak terorganisir, namun melibatkan banyak orang. Konspirasi berupa pembunuhan politik, teror skala kecil, gerilya kecil-kecilan, kudeta atau makar. Adapun pemberontakan yang menggunakan kekerasan dengan tujuan politik skala besar, yang terorganisir baik dan mendapat dukungan luas dari rakyat serta bertujuan menggulingkan kekuasaan, disebut perang dalam negeri.

Awal kekecewaan Muslim Moro terhadap Malacanang dimulai beberapa saat sebelum Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina. Moro yang identik dengan Islam, kecewa ketika pemerintahan persemakmuran Filipina yang dipimpin oleh Manuel Luis Quezon y Molina memberlakukan hukum nasional kepada setiap warganegarannya tanpa mengindahkan identitas agama. Kewenangan untuk memberlakukan hukum Islam dan mengatur pemerintahan sendiri di daerah kesultanan-kesultanan dicabut, diganti dengan model sentralisasi yang segala kebijakannya ditetapkan oleh pemerintah pusat yang didominasi oleh *Western Influenced Christian Filipino*. Identitas Islam yang termanifestasikan dalam wilayah kekuasaan yang luas dan kuantifikasi penduduk yang beragama Islam sebagai mayoritas di Mindanao, terancam dengan dilaksanakannya program integrasi nasional yang secara drastis merubah komposisi dan persebaran penduduk muslim di Mindanao. Kebijakan ini secara kontinyu ditempuh oleh kolonial Spanyol, Amerika Serikat dan kemudian pemerintah Malacanang sehingga pada tahun 1971, pemerintah boleh dikatakan "telah berhasil" menjadikan Muslim Moro sebagai minoritas di Mindanao.

Bumi Islam Moro yang meliputi Mindanao, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi dan Palawan mencapai sepertiga dari luas keseluruhan Filipina, yaitu sebesar 10,2 juta hektar atau 102.000 km². Sebesar 48,6% dari luas area ini dikategorikan sebagai hutan produktif, sedangkan 40%nya dikategorikan sebagai lahan penghasil komoditas pertanian.

Seiring dengan politik pasifikasi yang dijalankan pemerintah terhadap Muslim Moro, orang-orang Kristen Filipina yang mencari tanah dari Luzon dan Visayas datang berduyun-duyun ke Mindanao. Para pendatang menempati lahan pertanian Mindanao yang paling produktif dan berhasil menanam padi, jagung, dan kelapa. Perusahaan transnasional diberi hak luas penguasaan lahan untuk menanam nanas, pisang, karet. Para pengusaha kayu yang kaya dari Luzon maupun Visayas mendapatkan konsensi pembangunan hutan yang luas sekali. Perkembangan itu, yang diakibatkan oleh penerapan hukum tanah kolonial seperti Akta Registrasi Tanah 1902, Akta Komisi Filipina No. 718 dan Akta Tanah Umum 1903 yang tidak mengakui hukum adat Moro atas pengelolaan tanah, secara perlahan menimbun rasa benci di kalangan kaum muslim terhadap pemerintah pusat di Manila.⁴ Kehilangan tanah mengakibatkan Muslim Moro terpinggirkan dan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pemiskinan, karena satu-satunya sumber daya ekonomi mereka telah dikuasai oleh para pendatang. Mayoritas Muslim Moro tidak memiliki sumber mata pencaharian tetap sehingga pengangguran menjadi endemi.

⁴ Rufa Cagoco-Guiam, "*Mindanao: Hambatan dan Prospek Menuju Perdamaian Berkelanjutan*" dalam Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (eds.), 2005, hal. 187-188.

Seperti kebanyakan daerah kepulauan Filipina lainnya, pola penggunaan lahan di Mindanao mulai dikomersialisasikan sebagai penghasil komoditas pertanian.⁵ Dari tahun 1970-1978, rezim Marcos telah memfasilitasi kenaikan hingga 64,1% terhadap komersialisasi lahan pertanian di seluruh negeri. Selain itu, tanah air Bangsa Moro ini memiliki kelimpahan yang besar akan bermacam-macam mineral.⁶ Cadangan nikel terbesar dunia ditemukan di Nonoc, sebuah pulau di pantai tenggara Surigao del Norte. Mindanao diperkirakan memiliki cadangan biji besi sebanyak 11,6%. Emas dan perak ditemukan di Surigao del Norte, Agusan del Norte, dan Davao del Norte. Cadangan timah dan seng juga ditemukan di Zamboanga del Sur, sedangkan Davao Oriental memiliki 78% dari keseluruhan cadangan khrom Mindanao, yaitu sebesar 383.000 ton metrik. Cadangan marmer sebesar 128 juta ton metrik juga ditemukan di Davao del Norte. Mineral-mineral non-logam yang juga melimpah di tanah air bangsa Moro adalah lempung, sulfur, magnesit dan batu fosfat.⁷

Seluas 5,41 juta hektar hutan di Mindanao merupakan penghasil kayu.

Pada Desember 1977, rezim Marcos telah mengeluarkan sebanyak 376 izin

⁵ Salah satu tanaman komersial yang dikembangkan adalah pisang. Pisang sebagai komoditas ekspor ini memenuhi hingga 25.000 hektar tanah air Bangsa Moro yang paling subur. Pada tahun 1978, pisang menempati peringkat ke-9 pada daftar "Top Ten Exports". Sayangnya, industri ini berkembang di bawah kepemilikan perusahaan-perusahaan asing. Hal serupa juga terjadi pada industri kayu dimana kehadiran "US-based transnational corporation" memiliki peran yang sangat signifikan. Perusahaan-perusahaan ini: Internasional paper orporations, Georgia Pacific Corporation dan Weyerheuser Company memeiliki investasi di industri pengolahan kayu, produksi kertas dan kayu bulat. Lihat *Commodity Series* No. 2, 1981, hal 44 dan *Balai Asian Journal* Vol 2 No. 3, September 1981, hal 16-17.

⁶ World Metal Statistis dalam jurnal terbitannya Mei 1980 menyebutkan bahwa Filipina menempati peringkat 9 dan 16 dunia sebagai produsen penghasil tembaga dan emas terbesar. Kedua mineral ini merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina, disusul oleh nikel, kobalt, khrom dan perak. Jepang, USA, Korea Selatan, Belanda dan Taiwan adalah importer terbesar komoditas-komoditas mineral tersebut. Lihat *Balai Asian Journal*, Vol. 2 No. 1 Maret 1981, hal. 17.

⁷ Jamail A. Kamlian, 2004, hal. 91-92.

HPH dimana 188 nya merupakan area konsensi di Mindanao. Produksi kayu bulat di Mindanao berjumlah 72% dari total produk nasional pada tahun yang sama. Sebagian besar aktivitas bisnis ekstraksi kayu terkonsentrasi di Mindanao. Selain itu, Laut Mindanao, Sulu, dan Palawan memiliki kelimpahan sumber daya yang luar biasa. Hampir 59% tangkapan ikan negara tersebut berasal dari perairan Mindanao. Laut Sulu merupakan produsen terbesar dengan nilai sebesar 34% dari total produksi nasional. Daerah tangkapan terbesar lainnya adalah Teluk Moro dan Selat Basilan.⁸ Namun nelayan-nelayan Bangsa Moro tetap miskin dan terus termarginalisasi.

Pada awal tahun 1969, Nurullaji Misuari, seorang muslim asli Jolo, Sulu yang selama berabad-abad menjadi markas besar bagi nasionalisme Islam dan pusat revolusi di Bumi Islam Moro, mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Filipina. Dan membentuk Gerakan Separatis Moro National Liberation Front atau MNLF. MNLF adalah salah satu kelompok perjuangan kemerdekaan Bangsa Moro di Filipina Selatan. Politisasi persoalan Moro ini pada awalnya tidak begitu mendapat dukungan yang luas. Situasi berubah drastis ketika Pembantaian Jabidah 1968 terjadi, hal yang memunculkan keyakinan dari semua kalangan Muslim Moro bahwa *Christian Western Orientation* merupakan musuh bersama yang menjadi ancaman bagi eksistensi diri dan agama mereka.

MNLF mendapat dukungan yang luas setelah Muslim Moro mengalami rangkaian dehumanisasi yang dilakukan pemerintah secara

⁸ *Ibid.*

sistematis. Dehumanisasi tersebut telah memperkuat dan memperjelas ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat Muslim Moro selama puluhan tahun. Bahkan riwayat kekerasan melalui *Martial Law* telah menimbulkan kontra kekerasan baru di dalam masyarakat. Dukungan terhadap MNLF meluas sehingga menjadikan MNLF sebagai gerakan bersenjata yang semakin besar pengikutnya.

Misuari dan sebagian besar Muslim Moro berkeyakinan bahwa cita-cita tertinggi bagi perjuangan mereka adalah sebuah negara Islam yang dapat menampung idealisme dan aspirasi umat, yang dapat memelihara dan mengemangkan warisan agamanya di bawah naungan persaudaraan Islam yang universal di dan di bawah pemerintahan yang berdasarkan hukum, keadilan, dan demokrasi. Ketidakadilan yang telah menimbulkan kekecewaan komunal di Mindanao memang harus dibayar mahal oleh Filipina, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk puluhan tahun ke depan. Memori kolektif masyarakat masih tetap menyimpan kebencian jika persoalan yang ada terus diselesaikan dengan cara yang tidak adil dan represif.

Untuk meredam gejolak yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri, pemerintah Filipina berusaha mengadakan pendekatan dengan pihak pemberontakan melalui perundingan damai dengan memenuhi sebagian keinginan MNLF untuk memperoleh otonomi.

Dimulai dari rezim Ferdinand Marcos yang memulai mendekati MNLF untuk menyelesaikan permasalahan intern Filipina dengan cara memenuhi keinginan MNLF untuk mendapatkan otonomi. Yang pada

prosesnya persetujuan itu dilanggar. Akhirnya rezim Ferdinand Marcos runtuh, hal ini membawa perubahan baru dalam rangka melanjutkan proses perjanjian dengan pihak Moro. Presiden terpilih Corazon Aquino kembali membuka dialog dengan muslim Moro. Dengan fasilitasi OIC, pembicaraan intensif mulai dilakukan pada tahun 1986 dengan faksi perjuangan yang terbesar, yaitu, MNLF, guna mencari solusi atas konflik yang telah menahun tersebut. Dialog baru menunjukkan hasilnya ketika Filipina berada di bawah kepemimpinan Fidel V. Ramos dimana pada tanggal 2 September 1996 pemerintahan otonomi Mindanao yang pada prinsipnya adalah pemberian kekuasaan sebagian kepada wilayah tertentu dengan aparat terpilih, terbentuk. Dari situasi, kondisi dan catatan sejarah Filipina inilah Fidel Ramos mengeluarkan kebijakan-kebijakannya guna meminimalkan konflik yang terjadi di Mindanao. Ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana termaktub dalam 1996 Peace Agreement.

F. Hipotesa

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil suatu hipotesa bahwa Kebijakan Fidel Ramos terhadap MNLF adalah :

1. Meminimalkan konflik dengan cara memenuhi sebagian keinginan MNLF berupa otonomi.
2. Program rekonsiliasi nasional berupa amnesti dan perundingan yang menghasilkan perjanjian damai.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari melebarnya jangkauan penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini sejak tahun 1992, sebagai awal pemerintahan Presiden Fidel Ramos yang mana terjadi banyak kemelut dengan MNLF yang sudah berakar dari pemerintahan-pemerintahan Filipina terdahulu sampai dengan tahun 1998, yaitu tahun dimana masa Jabatan Presiden Fidel Ramos berakhir dan menghasilkan sebuah perjanjian damai yang baru.

G. Metode Pengumpulan Data

Dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empirik. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *Library Research* atau penelitian kepustakaan yang meliputi data-data yang bersumber pada buku-buku, majalah, surat kabar, jurnal, maupun literatur-literatur lainnya yang mempunyai relevansi positif dengan tema, termasuk dengan mengakses data dari internet.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan berbagai sub topik pembahasan :

Bab I Pendahuluan

Pada bab I Pendahuluan berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II Respon Pemerintah Filipina Terhadap Bangsa Moro.

Pada bab II akan dibahas mengenai Sejarah Masuknya Islam di Filipina, Latar Belakang Pemberontakan, Respon Pemerintah terhadap Umat Islam dan Respon Pemerintah terhadap Gerakan Islam.

Bab III Gerakan Separatis Moro National Liberation Front (MNLF)

Pada bab III membicarakan mengenai Sejarah Berdirinya Moro National Liberation Front, Finansial dan Dukungan dari Luar Negeri, Perpecahan di dalam Gerakan Separatis Moro, dan Tuntutan Politik Moro National Liberation Front.

**Bab IV Kebijakan Fidel Ramos Terhadap Moro National
Liberation Front (MNLF)**

Pada Bab IV memuat tentang Kebijakan Fidel Ramos berupa Otonomi dan Rekonsiliasi Nasional yang terdiri dari Amnesti dan Negoisasi Damai.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu